

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Produk Domestik Regional Bruto

1. Definisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perhitungan PDRB telah menjadi bagian yang sangat penting dalam makro ekonomi, khususnya tentang analisis perekonomian suatu wilayah. Hasil perhitungan PDRB ini memberikan kerangka dasar yang digunakan untuk mengukur aktifitas ekonomi yang terjadi dan berlangsung dalam suatu kegiatan perekonomian. Produk domestik regional bruto merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dirancang untuk menyajikan peristiwa dan perilaku ekonomi dalam eksploitasi sumberdaya dan lebih lanjut memahami keterkaitan transaksi-transaksin yang terjadi diantaranya¹, dan juga sebagai landasan ekonomi evaluasi kinerja perekonomian dan penyusunan berbagai kebijakan. Indikator ekonomi ini juga memberikan gambaran aliran seluruh nilai tambah barang dan

¹ BPS, Pedoman Praktis Pengitungan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota, (Badan Pusat Statistik: Jakarta, 07240.0903), h. 1. <http://www.bps.go.id>, diunduh pada 13 Oktober 2021 pukul 17.20 WIB.

jasa yang dihasilkan dan seluruh faktor-faktor produksi yang digunakan oleh perekonomian untuk menghasilkan nilai tambah barang dan jasa. Pada hakekatnya pertumbuhan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan arah lain pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.²

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan Nilai Tambah Bruto (NTB) seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang

² Bungaran silalahi, "Analisis Pengaruh Variabel Kependudukan Terhadap PDRB Harga Konstan di Kabupaten Jepara", (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang 2011), h. 32.
<http://eprints.undip.ac.id> diakses pada 13 Oktober 2021 pukul 21.10 WIB.

dimiliki residen atau non-residen. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada faktor-faktor produksi di daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Didalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu sama lain saling memerlukan baik dari bahan mentah maupun hasil akhirnya.

Penyusunan PDRB dapat dilakukan 3 (Tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan.³ PDRB atas harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk

³ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, "Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha", h. 19 <https://www.bps.go.id/publication/pdrb-provinsi-menurut-lapangan-usaha-2014-2018.html> diakses pada 13 Oktober 2021 pukul 22.21 WIB.

mengukur pertumbuhan ekonomi. Untuk menghitung angka-angka ada tiga pendekatan dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pendekatan produksi PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
- 2) Pendekatan pendapatan PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
- 3) Pendekatan pengeluaran PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari : (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan inventori, (5) ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konsep, tiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Dalam publikasi ini disajikan

PDRB dengan pendekatan produksi dimana unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 17 kategori usaha.⁴

2. Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya nilai PDRB yang kecil menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang kecil.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, "Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha". h. 13 <https://www.bps.go.id/publication/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-provinsi-menurut-lapangan-usaha-2014-2018.html> diakses pada 13 Oktober 2021 pukul 11.21 WIB.

3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB per kapita atas harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
5. PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Keberadaan perusahaan-perusahaan baik nasional maupun multinasional yang menghasilkan nilai barang/jasa akhir secara tidak langsung juga akan membawa pengaruh bagi perolehan pendapatan suatu daerah. Struktur perekonomian suatu daerah baik propinsi atau kabupaten akan mempengaruhi atau juga dipengaruhi oleh jumlah perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah yang bersangkutan. Semakin tinggi nilai barang/jasa akhir yang dihasilkan perusahaan-perusahaan yang

ada di daerah-daerah provinsi atau kabupaten amaka akan semakin tinggi pula perolehan PDRB nya dan nantinya pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga akan mengalami peningkatan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan PDRB akan memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian PDRB dapat diartikan sebagai jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang ada di daerah selama 1 (satu) tahun. Dalam perhitungan PDRB ini juga termasuk produk yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang beroperasi di daerah tersebut.⁵

B. Pertumbuhan Ekonomi

1. Definisi Dan Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Tekanan pada tiga aspek yakni: proses, output per kapita, dan jangka panjang.

⁵ Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka Mandiri, 2014), h. 256
<http://www.repository.umy.ac.id/> diakses pada 14 Oktober 2021 puku 02.30 WIB.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita, oleh sebab itu ada dua sisi yakni sisi output total (GNP) dan sisi jumlah penduduk.⁶

Meier mendefinisikan perkembangan ekonomi sebagai proses kenaikan pendapatan nyata per kapita dalam suatu jangka waktu yang panjang. Prof. Barran membenarkan pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kenaikan output per kapita barang-barang material dalam suatu jangka waktu.

Menurut Buchanan dan Ellis, perkembangan berarti mengembangkan potensi pendapatan nyata negara-negara terbelakang dengan menggunakan investasi yang akan melahirkan berbagai perubahan dan memperbesar sumber-

⁶ Novri Silastri, "Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi", Vol.4 No. 1, (Februari,2017), h.14, <https://www.neliti.com/publications/184664/pengaruh-jumlah-penduduk-dan-pendapatan-domestik-regional-bruto-pdrb-terhadap-ke> diakses pada 14 Oktober 2021 pukul 16.15 WIB.

sumber produktif yang pada gilirannya menaikkan pendapatan nyata per orang.

Definisi diatas dimaksudkan bahwa bagi perkembangan ekonomi, tingkat kenaikan pendapatan nyata seharusnya lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan penduduk.

Perkembangan ekonomi dipandang sebagai suatu proses dimana pendapatan nasional nyata perkapita naik dibarengi dengan penurunan kesenjangan pendapatan dan pemenuhan keinginan masyarakat secara keseluruhan. Dalam ungkapan Okun dan Richardson, perkembangan ekonomi adalah perbaikan terhadap kesejahteraan material yang terus menerus dan berjangka panjang yang dapat dilihat dari lancarnya distribusi barang dan jasa.⁷

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun

⁷ Jhingan M.L., *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Ed.1 Cet.17, (Rajawali Pers: Jakarta, 2016), h. 6-7.

yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun.⁸

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasa meningkat. Dalam dunia nyata amat sulit untuk mencatat jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Kesulitan itu muncul bukan saja karena jenis barang dan jasa yang dihasilkan sangat beragam, tetapi suatu ukurannya pun berbeda.

2. Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan kenaikan nilai riil produk domestik bruto (gross domestic product) bukan semata-mata menunjukkan peningkatan produk atau pendapatan secara makro pertumbuhan ekonomi itu juga telah menaikkan pendapatan perkapita masyarakat. Oleh karena itu, angka yang digunakan untuk menaksir perubahan output adalah nilai moneternya (uang) yang tercermin dalam nilai produk domestik bruto (PDB). Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi,

⁸ Tulus T.H Tmbunan, *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting*, (Jakarta: ghalia Indonesia,2003), h. 40.

PDB yang digunakan adalah PDB berdasarkan atas dasar harga konstan. Sebab dengan menggunakan harga konstan pengaruh perubahan harga telah dihilangkan, sehingga sekalipun angka yang muncul adalah nilai uang dari total output barang dan jasa, perubahan nilai PDB sekaligus menunjukkan perubahan jumlah kuantita barang dan jasa yang dihasilkan selama periode pengamatan. Formula dalam menghitung pertumbuhan (*growth*) adalah sebagai berikut:⁹ $G_t = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ Dimana: G_t = Pertumbuhan ekonomi periode t

$PDRB_t$ = PDRB riil periode t (berdasarkan harga konstan)

$PDRB_{t-1}$ = PDRB riil sebelumnya.

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Klasik

Dasar pemikiran dari teori klasik adalah pembangunan ekonomi dilandasi oleh system liberal yang

⁹ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005) h.129-130.

mana pertumbuhan ekonomi dipacu oleh semangat untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Jika keuntungan meningkat, dan investasi juga akan bertambah. Beberapa teori klasik antara lain sebagai berikut:

1. *Teori pertumbuhan Adam Smith*

Di dalam teori ini, ada tiga faktor penentu proses produksi pertumbuhan, yakni SDA, SDM dan barang modal.

2. *Teori pertumbuhan David Richardo*

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh SDA yang terbatas jumlahnya, dan jumlah penduduk yang menghasilkan jumlah tenaga kerja uang menyesuaikan diri dengan tingkat upah. David richardo juga melihat adanya perubahan teknologi yang selalu terjadi, yang membuat produktivitas tenaga kerja dan memperlambat proses diminishing return kemerosotan tingkat upah dan keuntungan kearah tingkat minimumnya, Daviavidrichardo juga

melihat pertanian sebagai sektor utama sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.¹⁰

b. Teori Neo Klasik

1. *Teori pertumbuhan Solow Swan*

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertumbuhan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi.

2. *Model pertumbuhan A. lewis*

Model ini dikenal dengan sebutan suplay tenaga kerja yang tidak terbatas adalah salah satu diantara model neoklasik yang meneliti dinegara-negara berkembang. Model ini menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi dimulai disebuah NSB yang mempunyai dua sektor yang berbeda, yakni sektor pertanian tradisional yang

¹⁰ Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, Cet.Pertama, (Jakarta: ghalia Indonesia, 2009), h.48-49.

subsistem di pedesaan dan industry yang modern di perkotaan. Pertumbuhan ekonomi terjadi karena pertumbuhan industry dengan proses akumulasi modal yang pesat, sedangkan di pertanian pertumbuhannya relative rendah dengan akumulasi capital yang rendah sekali.¹¹

c. Teori neo Keynesian

Model pertumbuhan yang masuk di dalam teori *Neokeynesian* adalah model dari Harrod dan Domar yang mencoba memperluas teori Keynes, mengenai keseimbangan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang dengan melihat pengaruh dari investasi, baik dari penerimaan agregat maupun pada perluasan kapasitas produksi atau penawaran agregat, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

¹¹ Licolin Arshad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: STIMYKPN, 2014), h. 61.

d. Teori Schumpeter

Teori ini menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha didalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini ditunjukkan bahwa pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaruan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi.¹²

4. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi menurut Ekonomi Syariah

Dalam perspektif ekonomi syariah, paling tidak terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ketiganya adalah:¹³

1. *Investible Resources* (sumberdaya yang dapat diinvestasikan)

¹² Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta, 1997), h. 493.

¹³ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.23-27.

Yang dimaksud dengan *Investible resources* ini adalah segala sumber daya yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian. Sumberdaya tersebut antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya modal. Untuk SDA, maka SDA yang pada dasarnya merupakan anugerah dari Allah yang telah disiapkan Allah untuk kepentingan manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah-Nya dimuka bumi, harus dapat dioptimalkan dengan baik dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan alam dengan baik. Adapun yang terkait dengan sumber daya modal, maka potensi daya yang bisa dioptimalkan antara lain adalah *saving rate* disuatu negara. *Saving rate* ini adalah proporsi dana yang disimpan oleh masyarakat dalam bentuk tabungan, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi. Ini tercermin antara lain

dari besarnya dana masyarakat yang ditempatkan disektor perbankan. Islam juga memberikan disinsentif bagi *iddle saving* melalui zakat. Setiap dana yang tidak diproduktifkan, maka jumlahnya bisa berkurang katena zakat. Untuk itu, memproduktifkan dana ke sektor riil menjadi salah satu opsi yang paling menguntungkan bagi perekonomian secara keseluruhan, apalagi ditengah negara berkembang yang memang membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur perekonomian negerinya.

2. Sumber Daya Manusia dan *Entrepreneurship*

Ketika basis ekonomi syariah adalah sektor riil, maka memiliki SDM *entrepreneur* yang mampu menggerakkan sektor riil adalah sebuah keniscayaan. Dibandingkan dengan Jepang dan Singapura yang memiliki jumlah *entrepreneur* hingga 10 persen dan 4 persen dari jumlah penduduk mereka, Indonesia

hingga tahun 2012 menurut kementerian koperasi dan UKM, baru memiliki *entrepreneur* sebanyak 0,18 persen dari jumlah penduduk padahal para *entrepreneur* inilah yang akan menjadi ujung tombak dalam membangun kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi ini dapat dicapai melalui pemenuhan dua hal, yaitu optimalisasi potensi lokal dan pengembangan budaya bisnis syariah.

3. Teknologi dan Inovasi

Technological progress disadari merupakan faktor yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Teknologi akan melahirkan efisiensi, dan basis teknologi ini adalah inovasi. Karena itu, inovasi menjadi suatu kebutuhan yang perlu didesain secara serius oleh pemerintah. Islam adalah ajaran agama yang memerintahkan umatnya untuk senantiasa inovatif. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya Allah menyukai

orang mukmin yang berkarya (*al mu'min al muhtarif*)” HR. Baehaqi.

C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya.¹⁴ Optimalisasi dalam penerimaan PAD hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro.

Analisis terhadap objek-objek pendapatan sering tidak berjalan seperti yang diharapkan karena alasan

¹⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Banten Dalam Angka 2017 (Banten: CV Dharmaputra, 2017), h.367.

keterbatasan kemampuan sumber daya yang dimiliki dan seringnya rotasi dan mutasi para pejabat-pejabat pemerintah yang berakibat pada banyaknya program-program strategis pemerintah yang tidak berjalan dengan semestinya. Ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya PAD yaitu:¹⁵

- a. Banyaknya sumber pendapatan kabupaten/ kota yang besar tapi digali oleh instansi yang lebih tinggi.
- b. Badan usaha milik daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah (PEMDA).
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
- d. Adanya kebocoran- kebocoran.
- e. Adanya biaya pungut yang masih tinggi.

¹⁵ Abdul Halim, Manajemen Keuangan Sektor Publik (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.169.

- f. Banyaknya peraturan daerah (PERDA) yang belum disesuaikan dan disempurnakan.
- g. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak [dan retribusi] sangat rendah.
- h. Perhitungan potensi tidak dilakukan.

Pendapatan asli daerah merupakan bentuk peran serta secara riil dari pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah. Untuk pembangunan pembiayaan penyelenggaraan tugas dan kewenangannya, maka akan terus diupayakan agar pembiayaan daerah harus dapat dibiayai dari pendapatan asli daerah yang merupakan komponen utama dalam pembangunan daerah, karena pada dasarnya PAD merupakan sumber pembiayaan- pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah berdasarkan UU No. 33 pasal 6 ayat (1) bersumber dari:¹⁶ a) Pajak daerah, b) Retribusi daerah, c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, d) Lain-lain PAD yang sah.

¹⁶ Suparmoko, Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah Edisi Pertama, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2002), h.39.

2. Indikator Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini akan membahas mengenai kelompok atau indikator dari pendapatan asli daerah sebagai berikut:¹⁷

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 untuk kabupaten/ kota dan provinsi adalah berbeda. Berikut dibawah ini merupakan pendapatan pajak menurut provinsi meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) Pajak kendaraan bermotor
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 4) Pajak kendaraan di atas air
- 5) Pajak air di bawah tanah
- 6) Pajak air permukaan.

Selanjutnya adalah jenis pajak kabupaten/ kota tersusun atas: 1) Pajak hotel, 2) Pajak restoran, 3) Pajak hiburan, 4) Pajak

¹⁷ Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.96-99.

reklame, 5) Pajak penerangan jalan, 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C, 7) Pajak parkir.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Begitupun dengan retribusi antara provinsi dan kabupaten/ kota berbeda. Untuk provinsi jenis pendapatan dari retribusi meliputi objek dibawah ini:¹⁸

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan
- 2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- 4) Retribusi pengujian kapal perikanan.

Selanjutnya adalah jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/ kota meliputi objek pendapatan dibawah ini:¹⁹

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan
- 2) Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak ktp
- 4) Retribusi penggantian biaya cetak akte catatan sipil

¹⁸ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, h.96-99.

¹⁹ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, h.96-99.

- 5) Retribusi layanan pemakaman
- 6) Retribusi pelayanan pengabuan mayat
- 7) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
- 8) Retribusi pelayanan pasar
- 9) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- 10) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- 11) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- 12) Retribusi pengujian kapal perikanan
- 13) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 14) Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan
- 15) Retribusi jasa usaha tempat pelelangan
- 16) Retribusi jasa usaha terminal
- 17) Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
- 18) Retribusi jasa usaha tempat penginapan/
persangrahan/ villa
- 19) Retribusi jasa usaha penyedotan kakus
- 20) Retribusi jasa usaha rumah potong hewan
- 21) Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal

- 22) Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga
- 23) Retribusi jasa usaha penyebrangan diatas air
- 24) Retribusi jasa pengolahan limbah cair
- 25) Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah
- 26) Retribusi izin mendirikan bangunan
- 27) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- 28) Retribusi izin gangguan
- 29) Retribusi izin trayek.

**c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang
Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik negara/ BUMN

3) Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain- lain PAD yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya.²⁰ Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain- lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi:

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- 5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah
- 6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

²⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Banten Dalam Angka 2017*, (Banten: CV Dharmaputra, 2017), h.367.

- 8) Pendapatan denda pajak
 - 9) Pendapatan denda retribusi
 - 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
 - 11) Pendapatan dari pengembalian
 - 12) Fasilitas sosial dan umum
 - 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan.

3. Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Islam

Pemerintah dan masyarakat pada dasarnya adalah dua institusi yang memiliki fungsi dasar sama, yaitu untuk merealisasikan segala kewajiban kolektif atau kewajiban publik dalam mewujudkan *falah*.²¹ Islam telah menentukan apa saja sektor-sektor penerimaan Negara atau pemerintah, yaitu melalui : 1) *zakat*, 2) *shadaqah*, 3) *ghanimah*, 4) *fai*, 5) *jizyah*, 6) *kharaj*, 7) *khums*’ 8) dan *lain-lain*.

²¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2014), h.446.

Jika diklasifikasikan maka pendapatan tersebut ada yang bersifat rutin seperti: zakat, jizyah, kharaj, ushr, infak dan shadaqah serta pajak jika diperlukan, dan ada yang bersifat temporer seperti: ghanimah, fa'i dan harta yang tidak ada pewarisnya.²²

Sebagaimana Negara modern lainnya, aktivitas Negara Islam modern telah meluas karena adanya perubahan-perubahan social ekonomi yang diakibatkan oleh revolusi industry dan kemajaun yang dibawa oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini, Negara modern harus dapat menyediakan prasarana social-ekonomi bagi pengembangan industry, pendidikan, telekomunikasi, transportasi hingga pelayanan medis. Untuk itu, dengan meningkatnya sedemikian besar kebutuhan hajat orang banyak bagi sebuah Negara, maka Negara memungut pajak

²² Rahman, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Jenepono (Perspektif Islam), UIN Makasar, 2016.

untuk menambah penerimaan Negara serta dapat mendanai kebutuhan pengeluaran yang terus meningkat.²³

Menurut Muhammad Sharif Chaudhry, Negara Islam modern boleh memungut pajak kekayaan, pajak pendapatan, bea-cukai, pajak penjualan, pajak hadiah, pajak dari capital gain, pajak property, dan sebagainya sebagai sarana penerimaan suatu Negara yaitu dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Pajak hendaklah dipungut karena alasan darurat, keperluan mendesak dan kebutuhan Negara yang sebenarnya, bukan untuk kepentingan kelas yang sedang berkuasa.
2. Hasil pungutan pajak haruslah dengan hati-hati digunakan dan dengan jujur dikeluarkan untuk kesejahteraan semua orang dan kepentingan public tanpa diskriminasi.
3. Prinsip pemerataan, keadilan dan kejujuran haruslah dipakai ketika menetapkan tarif, menaksir dan memungut pajak.

²³ Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar, (Jakarta: Kencana, 2012), h.269.

4. Jika tujuan ditariknya pajak itu telah tercapai, maka penarikan pajak itu haruslah dihentikan.
5. Aturan, regulasi, serta hukum pajak haruslah konsisten terhadap dan tidak berlawanan dengan aturan Islam. Dalam QS Al An'am ayat 165 menjelaskan:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.”²⁴

Pada kalimat “penguasa- penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat” ditujukan kepada para penguasa/ pemerintah

²⁴ Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, (Bandung: J-AR, 2004).

dalam suatu Negara atau daerah atas amanah yang mereka emban untuk kepentingan rakyat. Ayat diatas menjelaskan tentang kemandirian keuangan (baik penerimaan atau pengeluaran) suatu daerah dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan kemampuan para pengelolanya (penguasa suatu negeri/ daerah).

D. Teori Demografi (Kependudukan)

Secara arti sempit demografi diartikan sebagai kajian penduduk, berkaitan dengan jumlah, struktur, serta pertumbuhannya (United Nations, 1982), sedang dalam arti luas demografi merupakan ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik tentang besar, komposisi penduduk dan perubahannya (J. Bougue). Berdasarkan Multilingual Demographic Dictionarai (IUSSP, 1982) Demografi ditujukan untuk mempelajari penduduk pada suatu wilayah terutama mengenai jumlah, struktur (Komposisi Penduduk dan perkembangannya), sedangkan Philip M. Hauser dan Duddley Duncan (1959) mengemukakan tujuan demografi, yakni

mempelajari jumlah, persebaran, Teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan tersebut, yang biasanya ditimbulkan karena kelahiran (Fertilitas), Kematian (Mortalitas) dan migrasi Penduduk. Demografi merupakan studi yang sangat penting dan mengalami perkembangan. Secara umum tujuan dalam demografi adalah:

- a) Mempelajari kuantitas dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu.
- b) Menjelaskan kuantitas masa lampau, penurunan persebaran dengan data yang tersedia.
- c) Mengembangkan hubungan sebab-akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam-macam aspek organisasi sosial.
- d) Mencoba meramalkan pertumbuhan penduduk dimasa yang akan datang beserta kemungkinan-kemungkinan dan konsekuensinya.

Dalam proses pengumpulan data Demografi, maka sumber data kependudukan dapat dikelompokkan atas tiga dasar

besar, yaitu Sensus Penduduk, survey dan registrasi. Sebagai berikut penjelasannya:

1) Sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan (collecting), menghimpun dan menyusun (compiling) dan menerbitkan data-data demografi, ekonomi dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu wilayah atau daerah tertentu. Pada dasarnya inti tujuan sensus penduduk adalah menghitung jumlah orang atau penduduk pada suatu negara maupun daerah. Dalam melakukan sensus penduduk terdapat beberapa ketentuan yang membedakan sensus dengan metode pengumpulan data lainnya, yakni: Semua orang yang artinya semua orang atau penduduk (yang hidup) dalam wilayah yang dicacah haruslah tercakup, waktu tertentu yang artinya sensus haruslah dilaksanakan pada saat tertentu yang telah ditentukan dan harus dilaksanakan secara serentak pada suatu wilayah tertentu, yakni ruang lingkup sensus haruslah meliputi batas wilayah tertentu.

2) Survey Dimaksudkan dengan survey disini adalah survey dalam cakupan nasional. Dalam tahapan kerja dan keterangan yang dikumpulkan, survey tidak berbeda dengan sensus. Perbedaan survey dan sensus terletak pada cakupan wilayah yang dicacah, bila dalam sensus mencacah seluruh penduduk maka survey hanya mencacah sebagian penduduk saja yang dijadikan sebagai sampel. Hal lain yang membedakan survey dengan sensus penduduk adalah fleksibilitasnya, survey dapat diadakan kapan saja sedangkan sensus membutuhkan persyaratan periodic. Dalam hal materi yang dikumpulkan, survey bisa berganti-ganti topik atau dapat diberi penekanan pada aspek-aspek tertentu sesuai dengan kebutuhan.

3) Registrasi (Pencacahan) Registrasi merupakan kumpulan keterangan mengenai terjadinya peristiwaperistiwa lahir dan mati serta segala kejadian penting yang mengubah status sipil seseorang sejak dia lahir sampai dia mati. Kejadian-kejadian yang dimaksud adalah perkawinan, perceraian, pengangkatan anak (adopsi) dan perpindahan. Registrasi dilakukan

berlangsung secara terus-menerus mengikuti kejadian yang menjadi objek registrasi. Yang perlu diperhatikan dalam proses registrasi adalah penduduklah yang melaporkan ke badan yang berwenang mencatat, sehingga registrasi lebih cocok ditujukan pada negara maju karena tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya pendataan penduduk sangat tinggi. Dari ketiga pencatatan demografi terdapat kebaikan dan kekurangan satu sama lain, dimana tiap negara mempunyai perbedaan dalam pencatatan data demografi tergantung kondisi negara tersebut dan pengelola pencatatan merupakan faktor penting. Di Indonesia sendiri pencatatan yang dilakukan adalah dengan metode survey, yang diadakan sepuluh (10) tahun sekali, dengan survey pertama kali pada tahun 1930 oleh Pemerintahan Hindia Belanda.²⁵

²⁵ Bungaran Silalahi, "Analisis Pengaruh Variabel Kependudukan Terhadap PDRB Harga Konstan di kabupaten Jepara, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang 2011), h. 39, <http://eprints.undip.ac.id> diakses pada 15 Oktober 2021 pukul 21.21 WIB.

E. Teori Kependudukan (Population Studies)

Teori Kependudukan Studi Kependudukan (Population Studies) lebih luas dari kajian demografi murni, karena dalam memahami trend proses kependudukan di suatu daerah faktor-faktor non demografi ikut dilibatkan. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di beberapa bagian dunia menyebabkan jumlah penduduk meningkat dengan cepat. Hal ini menyebabkan terjadinya kemiskinan dan kekurangan pangan. Fenomena ini sangatlah menggelisahkan dan para ahli berusaha memberikan beberapa teori berkaitan dengan pertumbuhan penduduk dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Para ahli dikelompokkan dalam menjadi tiga kelompok pertama terdiri dari penganut Malthusian yang dipelopori oleh Thomas Robert Malthus, kedua aliran Neo Malthusian yang dipelopori oleh Gareth Hardin dan Paul Ehlich dan ketiga terdiri dari pakar-pakar dari teori kependudukan mutakhir yang merupakan reformulasi teori-teori kependudukan yang ada, beberapa pakar yang terlibat dalam teori ini adalah Jhon Stuart Mill, Arsene

Dumont, Michael Thomas dan Doubly. Berikut penjelasan menurut para ahli mengenai teori kependudukan:²⁶

1. Aliran Malthusian

Aliran Malthusian dipelopori oleh Thomas Robert Malthus, seorang pendeta Inggris (1766-1834) teorinya diawali dengan karangan (1798) yang berjudul:” Essai on Principles of population as it affect the future improvement of society, with remarks and speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet Writers “ yang menyatakan bahwa penduduk (seperti juga tumbuhan dan binatang) apabila tidak ada pembatasan, akan berkembang biak dengan cepat dan memenuhi dengan cepat permukaan bumi. Tingginya pertumbuhan penduduk ini disebabkan karena hubungan badan antara laki-laki dan perempuan tidak bisa dihentikan.

Selain itu Malthus berpendapat bahwa manusia hidup membutuhkan makanan, sedangkan laju pertumbuhan makanan

²⁶ Bungaran Silalahi, “Analisis Pengaruh Variabel Kependudukan Terhadap PDRB Harga Konstan di kabupaten Jepara, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang 2011), h. 40, <http://eprints.undip.ac.id> diakses pada 15 Oktober 2021 pukul 21.30 WIB.

jauh lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Apabila tidak diadakan pembatasan terhadap penduduk maka manusia akan mengalami kekurangan bahan makanan, hal inilah merupakan sumber dari kemelaratan dan kemiskinan manusia. Hal ini dijelaskan oleh Malthus sebagai berikut : “Human Species would increase as number 1,2,4,8,16,32,64,128,256 and substance as 1,2,3,4,5,6,7,8,9. In two centuries the population would be to the means of subsistence as 236 to 9, in three centuries as 4096 to 13 and in two thousand year the difference would be almost incalculable” ini merupakan kutipan asli dari pernyataan Malthus. Untuk dapat keluar dari permasalahan kekurangan pangan, pertumbuhan penduduk harus dibatasi, pembatasan tersebut dapat dilaksanakan dengan dua cara yakni : Preventive Checks dan Positive Checks. Preventive checks adalah pengurangan penduduk melalui penekanan kelahiran. Preventive Checks dapat dibagi menjadi dua, yaitu Moral Restraint (Pengekangan diri) yaitu segala usaha untuk mengekang hawa nafsu, dan Vice pengurangan kelahiran.

Positive Chevks adalah pengurangan penduduk melalui proses kematian.

Apabila jumlah penduduk melebihi jumlah persediaan bahan pangan, maka tingkat kelaparan akan meningkat yang mengakibatkan terjadinya kematian wabah penyakit dan lain sebagainya. Positive check dapat dibagi menjadi dua yaitu : Vice dan misery. Vice (kejahatan) adalah segala keadaan yang menyebabkan kematian, sedangkan misery merupakan keadaan dengan melihat proses kematian. Teori Malthus mendapat pro dan kontra dari berbagai ahli lainnya, karena menganggap teori yang dikemukakan tidaklah kompeten dan tidak mengikuti perkembangan zaman, berapa kritik terhadap teori Malthus adalah sebagai berikut :

- 1) Malthus tidak memperhitungkan kemajuan-kemajuan transportasi yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lain sehingga pengiriman makanan ke daerah-daerah kekurangan pangan mudah terlaksanakan

- 2) Malthus tidak memperhitungkan kemajuan yang pesat dalam teknologi, terutama dalam bidang pertanian, jadi produksi pertanian dapat pula ditingkatkan secara cepat dengan mempergunakan teknologi baru.
- 3) Malthus tidak memperhitungkan usaha pembatasan kelahiran bagi pasangan-pasangan yang sudah menikah. Usaha pembatasan kelahiran ini telah dianjurkan oleh Francis Place pada tahun 1822.
- 4) Fertilitas akan menurun apabila terjadi perbaikan ekonomi dan standar hidup penduduk dinaikkan, hal ini tidak diperhitungkan oleh Malthus.²⁷

2. Aliran Neo-Malthusian

Aliran Neo-Malthusian Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, teori Malthus mulai diperdebatkan kembali. Kelompok yang menyokong aliran Malthus tetapi lebih radikal disebut dengan Neo-Malthusians. Kelompok ini tidak

²⁷ Bungaran Silalahi, "Analisis Pengaruh Variabel Kependudukan Terhadap PDRB Harga Konstan di kabupaten Jepara, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang 2011), h. 42, <http://eprints.undip.ac.id> diakses pada 15 Oktober 2021 pukul 21.35 WIB.

sependapat dengan dengan Malthus bahwa mengurangi jumlah penduduk cukup dengan moral restrasint saja. Untuk keluar dari perangkap Malthus, aliran ini menganjurkan semua cara “Preventive Checks” misalnya dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi untuk mengurangi jumlah kelahiran, pengguguran kandungan (absortions), bahkan Paul Ehrlich menyatakan bahwa satu-satunya jalan untuk mengendaliakn tingkat kelahiran dibawah kendali dengan cara paksaan. Menurut kelompok ini pada abad ke-20 (pada tahun 1950-an), dunia baru yang pada jamannya Malthus masih kosong kini sudah mulai penuh dengan manusia. Dunia baru sudah tidak mampu untuk menampung jumlah penduduk yang selalu bertambah. Paul Ehrlich dalam bukunya “The Population Bomb” pada tahun 1971, menggambarkan penduduk penduduk dan lingkungan yang ada di dunia dewasa ini yakni pertama, dunia ini sudah terlalu banyak manusia; kedua, keadaan bahan makanan sangat terbatas, dan ketiga karena terlalu banyak manu

sia sehingga lingkungan sudah banyak rusak dan tercemar.²⁸

3. Beberapa Teori Kependudukan Mutakhir

a) Jhon Stuart Mill.

Jhon Stuart Mill, seorang ahli filsafat dan ahli ekonomi berkebangsaan Inggris dapat menerima pendapat Malthus mengenai laju pertumbuhan penduduk melampaui laju pertumbuhan bahan makanan sebagai suatu aksioma, namun demikian Jhon Stuart 44 Mill berpendapat bahwa pada situasi tertentu manusia dapat mempengaruhi perilaku demografinya, jika produktifitas seseorang tinggi maka terdapat kecenderungan memiliki keluarga kecil (fertilitas rendah). Mill menyanggah bahwa kemiskinan tidak dapat dihindarkan akibat pengaruh pertumbuhan penduduk, jika suatu waktu wilayah terjadi kekurangan bahan makanan, maka keadaan tersebut hanyalah bersifat sementara dan dapat ditanggulangi dengan mengimpor makanan atau memindahkan penduduk kedaerah lain. Jhon

²⁸ Bungaran Silalahi, "Analisis Pengaruh Variabel Kependudukan Terhadap PDRB Harga Konstan di kabupaten Jepara, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Dipenogoro, Semarang 2011), h. 43, <http://eprints.undip.ac.id> diakses pada 15 Oktober 2021 pukul 21.40 WIB.

Stuart Mill menyarankan peningkatan pendidikan sehingga penduduk lebih rasional sehingga mempertimbangkan perlu tidaknya menambah jumlah anak sesuai dengan karier dan usaha yang ada.

b) Arsene Dumont Arsene Dumont

Arsene Dumont Arsene Dumont merupakan seorang ahli demografi dari Prancis, pada tahun 1890 Arsene Dumont menulis sebuah artikel berjudul *Depopulation et Civilisation*, yang melancarkan teori Kapitalitas Sosial (*theory of social capitality*) yang mengacu pada keinginan seseorang mencapai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, dalam mencapai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, keluarga merupakan beban. Teori kapitalitas sosial dapat berkembang dengan baik pada negara demokrasi, dimana tiap individu mempunyai kebebasan untuk mencapai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, sedangkan di negara sosialis dimana tidak adanya kebebasan untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat, sistem kapitalitas sosial tidak berjalan dengan baik.

c) Michael Thomas dan Doubley

Michael Thomas dan Doubley Kedua ahli ini adalah penganut teori fisisologis, sadler mengemukakan, bahwa daya reproduksi manusia dibatasi oleh jumlah penduduk yang ada di suatu negara atau 45 wilayah, jika kepadatan penduduk tinggi maka daya produksi rendah, sebaliknya jika kepadatan penduduk rendah. Teori Doubley memiliki kesamaan dengan teory sadler, hanya titik tolak yang berbeda, jika Sadler mengatakan bahwa reproduksi penduduk berbanding terbalik dengan tingkat kepadatan penduduk, maka Doubley berpendapat bahwa reproduksi penduduk berbanding terbalik dengan makanan yang tersedia, jika suatu jenis mahluk diancam bahaya, mereka akan mempertahankan diri dengan daya yang mereka miliki, mereka akan mengimbangnya dengan reproduksi yang lebih besar (Iskandar, 1980). Menurut Doubley, kekurangan bahan makanan akan menjadi perangsang bagi daya reproduksi

manusia, sedangkan kelebihan pangan justru merupakan faktor pengekan perkembangan penduduk.²⁹

Sementara beberapa ekonom yang menekankan pandangan-pandangan Malthus, dua orang lain, Ester Boserup dan almarhum Julian Simon, kuat berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk memiliki efek ekonomi yang positif. Simon menunjukkan bahwa kelahiran lain berarti pikiran lain yang dapat membantu memikirkan cara menggunakan sumber daya yang lebih efisien. Lebih penduduk juga bisa merangsang permintaan investasi, mendobrak hambatan tradisional ke ekonomi pasar, memacu kemajuan teknologi, dan menyebabkan kerja keras (yang terakhir karena kehadiran lebih tanggungan dalam rumah tangga menimbulkan utilitas marjinal pendapatan relatif untuk rekreasi dan mengarah ke jam lagi kerja). Mereka mencatat juga bahwa populasi yang lebih besar dapat lebih mudah menanggung biaya penyediaan jenis tertentu sosial

²⁹ Bungaran Silalahi, "Analisis Pengaruh Variabel Kependudukan Terhadap PDRB Harga Konstan di kabupaten Jepara, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang 2011), h. 450.
<http://eprints.undip.ac.id> diakses pada 15 Oktober 2021 pukul 21.50 WIB.

infrastruktur transportasi, komunikasi, pasokan air, pemerintah, penelitian-yang perlu meningkatkan kurang dari proporsional dengan populasi. Memang, Simon berpendapat bahwa sumber daya utama adalah orang, dan bahwa dunia akan lebih baik dengan lebih banyak dari mereka.³⁰

F. Hubungan Antar Variabel (Variabel Dependen dan Independen)

1. Hubungan Jumlah Penduduk terhadap PDRB

Jumlah penduduk yang besar berdampak langsung terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berupa tersedianya tenaga kerja yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan proses produksi, akan tetapi kuantitas penduduk tersebut juga memicu munculnya permasalahan yang berdampak terhadap pembangunan ekonomi seperti pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan kemampuan produksi menyebabkan tingginya beban pembangunan berkaitan dengan penyediaan pangan, sandang dan papan. Sebagai akibat dari penambahan penduduk yang begitu cepat akan mengakibatkan

³⁰ Priyono dan Zaenudin Ismail, *Teori Ekonomi*, (penerbit: Dharma Ilmu, 2012), h. 195.

terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan alam sebagai bahan baku primer produksi maupun fasilitas kehidupan yang tersedia.³¹

2. Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB

Peningkatan pendapatan asli daerah menunjukkan adanya partisipasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di daerahnya. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka akan menambah dana pemerintah daerah yang kemudian akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di daerah tersebut. Pemerintah daerah yang salah satu tugasnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan pendapatan asli daerah sebagai bentuk kemandirian di era otonomi daerah sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi yang

³¹ Bungaran silalahi, "Analisis Pengaruh Variabel Kependudukan Terhadap PDRB Harga Konstan di Kabupaten Jepara, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang 2011), h. 47.
<http://eprints.undip.ac.id> diakses pada 02 Oktober 2020 pukul 21.30 WIB.

dilihat dari pertumbuhan PDRBnya dari tahun ke tahun.³²

G. Perumusan Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk diduga berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto
2. Pendapatan Asli Daerah diduga berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto
3. Jumlah Penduduk dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama diduga berpengaruh terhadap PDRB.

³²Trias Fajar Novianto, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 1992-2011 (Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang, 2013), h. 14, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/2924>, diakses pada 26 Maret 2021 pukul 19.00 wib.